RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-3 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT ADITYA KIRANA MANDIRI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 8 - 14 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Tim Pengambil Keputusan		1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bidang Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor PHPL bidang Ekologi
3.	Ir Jaenudin Trisna S	Auditor PHPL Prasyarat
4.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL bidang Produksi & VLK Hutan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Aditya Kirana Mandiri	
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Purworejo No. 24 Menteng - Jakarta Pusat	
c.	Email	:	vestol93@yahoo.co.id	
d,	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)	
e.	SK IUPHHK-HA	:	No. 862/Kpts-VI/1999 Tanggal 12 Oktober 1999	
f.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT	:	42.700 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama	: Erwan Soekardja
			- Komisaris	: Ersandria Reza Renny Soetia
			- Direktur Utama	: Djohansyah Ramlie
			- Direktur	: Aimee Emerald Ramlie Ersandria Rendrata Arya Setyaki
h.	MR Audit Penilikan Ke-3	:	Ir H Imam Aziz, MBA	

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-3 (kesatu) S-PHPL PT Aditya Kirana Mandiri menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	8 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Mulyanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	8 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19,

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 8 - 12 September 2020	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria produksi & VLK Hutan 2) Room 2 untuk kriteria ekologi 3) Room 3 untuk kriteria sosial 4) Room 4 untuk standar VLK Hutan c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	14 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke-3 PHPL pada IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 2) Mulyanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
5.	Pertemuan Penutupan	14 September 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-3 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 30 September 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-3 S-PHPL pada PT Aditya Kirana Mandiri dilakukan pada tanggal 30 September 2020. 2. PT Aditya Kirana Mandiri dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 84,85% dengan predikat BAIK, tidak ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Sedang	2	Dokumen legal seperti akte pendirian perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, SKT, SPPKP, SK IUPHHK-HA, serta dokumen administrasi tata batas PT Aditya Kirana Mandiri tersedia tetapi tidak lengkap, antara lain tidak tersedia dokumen NIB dan sebagian laporan Tata Batas.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan tata batas temu gelang yaitu sepanjang 186,180 km.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Di dalam areal IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat konflik terkait batas dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lain yang berbatasan. Sesuai dengan dokumen Berita Acara pelaksanaan tata batas diketahui bahwa areal IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri sudah ditata batas dan sudah terdapat persetujuan dan penandatanganan Berita Acara dari para pihak sesuai dengan kewenangannya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik batas adalah sebagai berikut : - Melakukan monitoring dan identifikasi konflik secara terus menerus - Melakukan pemetaan lokasi konflik
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	Baik	3	Pada areal IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri terdapat perubahan fungsi kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) yaitu perubahan dari HPT menjadi APL seluas ± 4.861 Ha. Perubahan fungsi kawasan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021), dan telah disahkan dengan SK No SK.4146/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi	Sedang	2	Pada areal IUPHHK-HA PT. Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah untuk kegiatan di luar sector kehutanan seperti IPPKH, tetapi terdapat penggunaan kawasan yang tidak sah berupa lahan perladangan dan pemukiman. Berdasarkan dokumen monitoring okupasi lahan, kegiatan perladangan dan informasi pemanfaatan kawasan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Not Aplicable). (CD)			oleh masyarakat desa di areal kerja IUPHHK-HA PT AKM s/d Agustus 2020, di dalam areal PT AKM terdapat 36 peladang dengan tanaman padi, sayuran, karet, merica dan coklat, yang berlokasi di desa Long Duhung, Long Keluh, Long Pelay, Long Lamcin dan Long Suluy. Upaya yang dilakukan oleh PT Aditya Kirana Mandiri dalam mencegah meluasnya areal perladangan tersebut adalah melakukan monitoring okupasi lahan secara rutin. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				**(16/18) X 100 % = 88,89 %**
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan/ disahkan oleh Direktur Utama PT. Aditya Kirana Mandiri dengan SK No. 010/AKM-1a/02.12 tanggal 15 Februari 2012 Visi dan Misi PT. Aditya Kirana Mandiri telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Sedang	2	Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai berikut: - Berita Acara Sosialisasi Visi – Misi dan Peraturan Perusahaan kepada karyawan PT Aditya Kirana Mandiri, tanggal 17 Desember 2018 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Bina Desa Kampung Long Duhung, tanggal 31 Maret 2019 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Bina Desa Kampung Long Keluh, tanggal 15 Januari 2019 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Bina Desa Kampung Long Lamcin, tanggal 14 November 2019 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan serta Bina Desa Kampung Long Pelay, tanggal 15 Desember 2018 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			serta Bina Desa Kampung Long Suluy, tanggal 14 November 2019 Namun fakta lapangan menunjukkan masih terdapat gangguan hutan oleh masyarakat berupa perladangan di areal Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan terjadi penolakan kegiatan RKT 2020 oleh masyarakat Desa Long Keluh. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya visi dan misi perusahaan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan belum sepenuhnya terpenuhi seperti keberadaan Ganis PHPL yang belum sesuai dengan ketentuan, tidak tersedia Ganis PHPL Kurpet dan Nenhut, kegiatan pemanenan tahun 2020 dan Carry Over 2019 yang masih baru mencapai 1.482,47 M3 (6 % dari target sebesar 25.321 M3), pemenuhan terhadap SOP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan. Untuk aspek kelola lingkungan implementasinya belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti masih terdapat gangguan Kawasan Lindung berupa perladangan di areal Sempadan Sungai, sarana prasarana perlindungan hutan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (P.32). Di bidang sosial pemenuhannya juga belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan, Walaupun sebagian relatif cukup baik. Realisasi dana yang dipergunakan untuk kegiatan kelola sosial tahun 2019 mencapai Rp 314.400.000 atau sekitar 3 kali lipat dari rencana (Rp 104.300.000), pemanfaatan tenaga kerja lokal sebanyak 21 orang dari 69 orang karyawan (30 %), kerjasama dengan 1 supplier local.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) X 100 % = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	1	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan Ganis PHPL belum memenuhi kebutuhan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. PT Aditya Kirana Mandiri belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut dan masih kekurangan Ganis PHPL Canhut dan Ganis PHPL Binhut.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(CD)			Kebutuhan dan ketersediaan Ganis PHPL PT Aditya Kirana Mandiri secara lengkap adalah sebagai berikut: - Ganis PHPL Kurpet dibutuhkan 1 orang, belum tersedia (kekurangan 1 orang) - Ganis PHPL Canhut dibutuhkan 2 orang, tersedia 1 orang (kekurangan 1 orang) - Ganis PHPL Nenhut dibutuhkan 2 orang, belum tersedia (kekurangan 2 orang) - Ganis PHPL Binhut dibutuhkan 2 orang, tersedia 1 orang (kekurangan 1 orang) - Ganis PHPL PKB-R dibutuhkan 2 orang, tersedia 3 orang (memenuhi). Dengan demikian PT Aditya Kirana Mandiri kekurangan Ganis PHPL sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Ganis PHPL Kurpet dan 2 (dua) orang Ganis PHPL Nenhut, 1 (satu) orang Ganis PHPL Canhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Berdasarkan telaah dokumen Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi/Pelatihan dan wawancara dengan auditee jumlah peningkatan kompetensi personil SDM PT. Aditya Kirana Mandiri selama 1 tahun terakhir mencapai > 100 %, tetapi jenis pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Terdapat kekurangan Ganis PHPL Kurpet, Canhut dan Nenhut tetapi tidak dilakukan Diklat untuk jenis Ganis tersebut,tetapi justru dilakukan diklat Ganis PKB-R yang sudah tersedia lebih dari jumlah yang ditentukan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT. Aditya Kirana Mandiri Mandiri belum sepenuhnya memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT. Wana Adiprima Mandiri belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki antara lain adalah : - Peraturan Perusahaan dan pengesahannya - Penerapan Upah Minimum - BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. - Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2020 Dokumen yang belum dimiliki antara lain : - Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2019 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/Basecamp belum sepenuhnya tersedia, walaupun didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Pusat di Jakarta.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(9/15) X 100 % = 60,00 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT. Aditya Kirana Mandiri telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No. 06/AKM-Ia/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan Struktur Organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Namun belum didukung dengan SDM yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. Aditya Kirana Mandiri masih kekurangan Ganis PHPL sebanyak 5 orang yaitu 1 (satu) orang Ganis PHPL Kurpet, (dua) orang Ganis PHPL Nenhut, 1 (satu) orang Ganis PHPL Canhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Sedang	2	PT. Aditya Kirana Mandiri telah memiliki peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi. Terdapat Surat Penunjukan Petugas SIM PNBP Pemanfaatan Hutan Produksi No. 010/AKM-Ib/VI/2016 tanggal 02 Juli 2016 kepada Sdr. Supandi, S.Hut, dengan tugas menginput data yang berhubungan dengan pembayaran PSDH-DR dan pembayaran lainnya untuk produksi kayu PT AKM. Terdapat SK Direktur PT AKM No. 010/AKM-Ib/10.15 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Petugas Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) IUPHHK-HA PT AKM (a.n. Supandi, S.Hut) Terdapat SK Direktur PT AKM No. 005/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2019 IUPHHK-HA PT AKM (a.n. Wartono, No. Reg. 01049-11/PKB-R/XX/2013, masa berlaku 10 April 2022). Terdapat SK Direktur PT AKM No. 008/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) RKT Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT 2018 IUPHHK-HA PT AKM (a.n. Wartono, No. Reg. 01049-11/PKB-R/XX/2013, masa berlaku 10 April 2022). Namun dalam implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan lancar, antara lain masih terdapat laporan rutin kepada instansi terkait yang belum disampaikan secara rutin dan terdapat ketidaklancaran dalam pemenuhan data pada pelaksanaan audit penilikan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3 ini.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Baik	3	Terdapat SK penunjukan personil SPI yaitu SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri No. 028/AKM-IA/10.08 tanggal 02 Oktober 2019, dengan personil SPI atas nama Ir. Adi Prasetya (Ketua SPI merangkap Bidang Forsetry), Donce Pradono, SE (Bidang HRD), Dewi Ismiati, SE (Bidang Keuangan. Selama periode audit, SPI PT. AKM telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 kali yaitu tanggal 7 – 15 Januari 2020, sesuai dengan dokumen laporan SPI No. 01/AKM-SPI/I/2020 tanggal 22 Januari 2020. Hasil verifikasi laporan SPI diketahui bahwa kegiatan internal audit PT. AKM telah mencakup seluruh bidang kegiatan PHPL. Dengan demikian maka kegiatan SPI sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Berdasarkan verifikasi dokumen laporan kegiatan SPI dan tindaklanjutnya, diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum dilakukan, baru direncanakan. Laporan selanjutnya belum tersedia. Namun dari hasil kajian Auditor diketahuit terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, sebagai contoh pemenuhan Ganis PHPL belum sesuai dengan ketentuan, belum ada perbaikan dari tahun lalu.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(18/24) X 100 % = 75,00 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.5.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Baik	3	Dalam periode audit penilikan 3 PT Aditya Kirana Mandiri, terdapat penerbitan RKT yaitu : - RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan No. 522.110.1/72/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 8 April 2019. - RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT AKM dengan Keputusan No.001/AKM/Kpts-RKT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT. AKM telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya BAP sosialisasi dan persetujuan sebagai berikut: - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (31-03-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (15-01-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Lamcin terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Suluy terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Aditya Kirana Mandiri (05-08-2020) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Aditya Kirana Mandiri (12-01-2020)
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Baik	3	Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri telah dilakukan penataan seluruhnya di lapangan (100 %) dan terdapat dokumen buku laporan dan Berita Acara penataan batas yang telah disetujui oleh para pihak yaitu pemerintah (Pusat dan Daerah), Perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat. Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, keberadaan PT. Aditya Kirana Mandiri telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Long Pelay, Long Keluh, Long Duhung, Long Lamcin dan Long Suluy, dan pihak perusahaan yang berbatasan langsung/persekutuan yaitu PT Mahardika Insan Mulia, PT Inhutani I, PT WBPU, PT Amindo Wana Persada dan PT Aquila Silva (Eks Bina Segah Utama). Selain itu, terus berlangsungnya operasional perusahaan selama ini merupakan bukti bahwa keberadaan PT Aditya Kirana Mandiri diakui oleh para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Baik	3	Dalam periode audit PT. Aditya Kirana Mandiri memiliki dokumen Rencana Kelola Sosial yang mengacu kepada dokumen RKT yang telah disahkan. Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2019 dan RKT 2020. Rencana kegiatan Kelola Social telah disosialisasikan kepada masyarakat desa bersamaan dengan sosialisasi

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			RKT, sesuai dengan BAP sebagai berikut : - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (31-03-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (15-01-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Lamcin terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Suluy terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Aditya Kirana Mandiri (05-08-2020) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Aditya Kirana Mandiri (12-01-2020)
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Kawasan Lindung PT. Aditya Kirana Mandiri seluas 4.753 Ha telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan : - Dokumen RKL dan RPL PT AKM yang telah mendapat persetujuan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999 - Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT AKM periode 2012 – 2021 yang telah disahkan Menteri LHK dengan SK No. SK. 4146/MenLHK-PHPLUHP/ HPL.1/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 - SK Direktur PT AKM No. 041/AKM-Ia/09.16 tanggal 12 September 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT AKM. Kawasan Lindung dimaksud terdiri dari : 1. Sempadan Sungai Seluas 1.113 Ha 2. Kawasan Konservasi Insitu (KKI) seluas 1.069 Ha 3. Buffer Zone Hutan Lindung seluas 2.251 Ha 4. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 320 Ha Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar secara khusus pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana BAP Sosialisasi berikut : - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Pengakuan Desa Long Duhung terhadap Areal Kerja dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri (31-03-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Pengakuan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Desa Long Keluh terhadap Areal Kerja dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri (15-01-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Pengakuan Desa Long Lamcin terhadap Areal Kerja dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) - Berita Acara Sosialisasi dan Pernyataan Pengakuan Desa Long Suluy terhadap Areal Kerja dan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri (14-11-2019) Selama periode kegiatan yang diaudit pada penilikan 3 yaitu 1 tahun terakhir (September 2019 – Agustus 2020) PT AKM melakukan sosialisasi pada 3 Desa Binaan yaitu Desa Long Duhung, Desa Long Lamcin, dan Desa Long Suluy, sedangkan 2 Desa lainnya yaitu Desa Long Keluh dan Desa Long Pelay tidak dilakukan sosialisasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(19/21) X 100 % = 90,48 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 untuk luas areal kerja ± 42.700 Ha sesuai dengan SK. No.4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Dapat diverifikasi keberadaan kelengkapan peta RKUPHHK-HA skala 1:100.000. Diverifikasi bahwa dokumen RKUPHHK-HA telah disusun berbasis pelaksanaan IHMB yang dijadikan sebagai dasar Penyusunan RKUPHHK-HA Periode 2012-2021. Selama periode audit 1 (satu) tahun terakhir, tidak terdapat perubahan RKUPHHK-HA.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Berdasarkan telaah Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa implementasi PAK belum seluruhnya sesuai lokasi sesuai urutan pada RKUPHHK-HA, namun masih berada pada Blok 10 Tahun sesuai RKUPHHK-HA. - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 menggunakan Blok II - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 menggunakan Blok III

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Perbedaan lokasi dan luas penataan areal kerja dengan RKUPHHK-HA disebabkan karena belum teralisasinya kegiatan Pemanenan pada Blok RKT Tahun 2013 dan 2014. Terdapat Pelaporan Perubahan Urutan Blok IX (RKT Tahun 2020) menjadi Blok III (RKT Tahun2014) sesuai Surat Direktur PT AKM No. 07/AKM-1a/VI/2020 tanggal 02 Juli 2020, disampaikan dan diterima oleh KLHK tertanggal 02 Juli 2020. Terdapat stempl penerimaan dan paraf penerima.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan dokumentasi melalui foto dan vidio berkoordinat terhadap Tanda Batas Blok dan Petak didapatkan pendanaan yang jelas sesuai dengan pengambilan data lapangan pada pelaksanaan audit.
		Nilai Kematangan/ Bobot Indikator		(16/18) 100% = 88,89 %
		Nilai Kinerja Indikator		**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki data potensi berdasarkan kegiatan IHMB didapatkan potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 12,76 batang/Ha dengan volume 35,58 m^3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 7,71 batang/Ha dengan volume 28,25 m^3/Ha. PT Aditya Kirana Mandiri memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir dengan rincian : a. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi: • Diameter 50-59 cm rata-rata sebesar 5,7 batang/Ha dengan volume 15,02 m^3/Ha. • Diameter 60 cm - up rata-rata sebesar 4,5 batang/Ha dengan volume 26,57 m^3/Ha. b. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi: • Diameter 50-59 cm rata-rata sebesar 0,84 batang/Ha dengan volume 1,94 m^3/Ha.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				• Diameter 60 cm - up rata-rata sebesar 5,9 batang/Ha dengan volume 28,66 m^3/Ha. c. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan potensi: • Diameter 50-59 cm rata-rata sebesar 4,3 batang/Ha dengan volume 10,64 m^3/Ha. • Diameter 60 cm - up rata-rata sebesar 10,3 batang/Ha dengan volume 56,09m^3/Ha. Terdapat kelengkapan peta ITSP yaitu berupa sebaran pohon skala 1:1.500 dengan sample Petak BC-21, BD-21, dan BE-21.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki SOP Petak Ukur Permanen No. 07/AKM-BC/SOP.PUP/XII/2019 tanggal 27-12-2019. PT Aditya Kirana Mandiri pada periode 1 tahun terakhir telah melaksanakan analisa riap PUP sesuai dengan keberadaan dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan Petak Ukur Permanen Seri 3 pada Petak AT-22. Lokasi PUP $116^0$40'21,54"E dan $1^0$58'7,66"N. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan besaran rata-rata riap sebesar 1,45 / tahun.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Aditya Kirana Mandiri telah melaksanakan pelaporan analisa riap PUP kepada instansi terkait sesuai dengan keberadaan dokumen dokumen tanda terima tanggal 31 Agustus 2020. PT Aditya Kirana Mandiri belum memanfaatkan data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP untuk perhitungan internal / self JTT. JTT didasarkan pada pelaksanaan ITSP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur pada periode audit Penilikan Ke-3 PHPL dapat diverifikasi belum seluruhnya tersedia untuk seluruh SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dan isinya belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada PT Aditya Kirana Mandiri dapat diverifikasi keberadaan implementasi tahapn sistem silvikultur, dengan kondisi : a. Penataan Areal Kerja Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanan pada et-1 Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegitan PAK seluas 861 Ha pada Blok RKTUPHHK 2020 sesuai BAP tanggal 30 Juni Tahun 2019. b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan dilaksankan pada et-1 Pada tahun 2019 pelaksanaan ITSP dilaksanakan pada Blok III seluas 831 Ha. Penandaan pohon ditebang dilakukan menggunakan barcode warna kuning. Hasil inventarisasi dituangkan dalam peta sebaran pohon skala 1:2.000 c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Pelaksanaan Pembukaan Wilayah Hutan dilaksanakan Et-0. relisasi pembuatan jalan pada tahun 2019 sepanjang 8 km dari rencana sepanjang 8,91 km. Terdapat peta rencana dan realisasi jalan skala 1:2.000. d. Pemanenan Pelaksanaan pemanenan tahun 2019 teralisasi sebanyak 10.529,62 m^3 dari rencana sebanyak 30.080,00 m^3 atau teralisasi sebesar 35%. e. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan Pelaksanaan Penanaman yang dilaksanakan pada tahun 2019 berupa Penamanan Pengayaan sesuai dengan BAP tanggal 23 Desember 2019, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan berupa kegiatan Penanaman/ Pengayaan Kawasan Lindung Untuk Jenis Pakan Satwasesuai dengan BAP tanggal 24 Februari 2020. Penanaman Tanah Kosong seperti yang telah direncanakan dalam RKU belum terlaksanan. f. Pembebasan Pohon Binaan PT Aditya Kirana Mandiri tidak memiliki kewajiban karena seluruh areal kerja pada periode RKU seluruhnya berada pada HPT. g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Tahun 2019 terdapat realisai kegiatan perindungan dan pengamanan hutan berupa

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kegiatan patroli di seluruh blok tebangan, pemasangan plang peringatan maupun himbauan
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Tingkat kecukupan potensi tegakan dilaksanakan dengan menggunakan metode petak ukur jalur pada penghitungan jumlah pohon inti dan pohon disisakan (tidak ditebang) dari jenis komersial. Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan per hektar sebanyak 26 Pohon/Ha (>25 Pohon/Ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Tingkat kecukupan potensi permudaan dilaksanakan dengan menggunakan plot petak ukur jalur. Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah Pancang per hektar sebanyak 406 Pancang/ Ha (>400 Pancang/Ha).
		Nilai Kematangan/Bobot Indikator		(16/21) 100% = 76,19 %
		Nilai Kinerja Indikator		**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan sesuai dengen keberadaan SOP Reduce Impact Logging No. SOP Nomor : 17/AKM-BC/SOP.RIL/I/2020 tanggal 5 Juli 2020 Revisi Ke 2. SOP telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT 2019) terdapat implementasi kegiatan RIL yang diterapkan pada tahapan kegiatan : 1. Pada kegiatan Perencanaan Pemanenan berupa Penggambaran Peta Kerja menggunakan software Arc GG, PAK (pembagian blok tebangan), ITSP, membuat rintisan jalan sarad. 2. Pada kegiatan Pemanenan telah melaksanaan kegiatan Pemanenan dengan mengarahkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pohon dengan meminimalkan kerusakan pohon, disamping itu, chainsawman dan operator traktor menggunakan APD dan K3. 3. Pada Kegiatan Pasca Pemanenan belum secara optimal dilaksanakan, misalnya Sudetan.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	Besaran Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal yang telah dilaksanakan melalui Studi Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal dengan metode analisa vegetasi sesuai Laporan Pengamatan Tingkat kerusakan Tegakan Tinggal di Areal Bekas Tebangan RKT 2019. Pelaksanaan studi dilakukan di Petak BD 19. Metode yang dilakukan yaitu Jalur berpetak secara sistematis. Didapatkan besarkan Kerusakan tegakan tinggal pada pelaksanaan kegiatan penebangan sebesar 12,1 % (<15%)..
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan Perhitungan faktor ekploitasi kayu hasil produksi berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dibandingkan Taksiran Tegakan (LHC) dengan sample pohon pada Petak BD-19 didapatkan faktor eksplitasi sebesar 0,99 (>0,7).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	Pada periode audit Penilikan Ke-3 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri, diantaranya : • RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (Carry Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No SK.522.110.1/72/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 07 April 2019 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku s/d 31 Desember 2019. • RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Aditya Kirana Mandiri sesuai dengan SK No. 01/AKM/Kpts-RKT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku s/d 31 Desember 2020.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	Telaah Kesesuaian Penggambaran Peta pada RKUPHHK-HA : • Pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2019, terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang (Blok II / 2019) dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer Zone, Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Tegakan Benih. Skala 1 : 100.000 sesuai RKUPHHK-HA yang telah disahkan. • Pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2020, terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang (Blok III / 2020) dan terdapat alokasi Kawasan Lindung seperti : Buffer Zone, Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Sempadan Sungai, serta Areal Tidak Produktif seperti : PUP dan Tegakan Benih. Skala 1 : 100.000 sesuai RKUPHHK-HA yang telah disahkan.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*l pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Baik	3	Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok tebangan telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan areal kerja sesuai dengan keberadaan dokumen BAP Penataan Areal Kerja Pelaksanaan implementasi peta kerja pada kawasan lindung telah dilaksanakan melalui kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai dengan keberadaan dokumen BAP Penandaan Kawasan Lindung. Dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa terhadap sample yang ditentukan terdapat penandaan baik plang maupun batas di lapangan untuk batas blok dan petak tebangan, serta kawasan lindung sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	- Realisasi volume tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebesar 10.529,62 m^3 dari rencana sebesar 30.080,00 m3 atau teralisasi 35% (<70%). - Realisasi luas tebangan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 seluas 917 Ha dari rencana

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				seluas 1.739 Ha sesuai RKT atau 52% (<70%), yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19/21) 100% = 90,48 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Laporan Keuangan beserta Laporan Akuntan Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 IUPHHK-HA sesuai Laporan No. 019T/DW/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Sjarifudin Chan. Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan sebagai berikut : - Likuiditas = 407,99 % (>150%) - Solvabilitas = 124,59 % (100-150%) - Rentabilitas = 0,04 (+) - Opini = Wajar Dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan fnansial perusahaan belum seluruhnya memenuhi norma Baik , dimana masih terdapat Opini Wajar dengan Pengecualian.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Sedang	2	Berdasarkan keberadaan dokumen Rencana dan Realisasi dana berdasarkan RKAP didapatkan realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp. 9.448.230.118 dari rencana sebesar Rp. 15.159.215.000 atau terealisasi sebesar 62 % (60-80%).
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	Berdasarkan keberadaan dokumen Rencana dan Realisasi dana berdasarkan RKAP didapatkan proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan : - Realisasi dana tertinggi pada kegiatan Perencanaan Hutan sebesar 86%. - Realisasi dana terendah pada kegiatan Pemanenan Haasil Hutan sebesar 44%.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dengan demikian, terdapat perbedaan proporsi realisasi sebesar 41% (20-50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Realisasi Dana Kelola Hutan rata-rata sebesar 62%, menunjukkan bahwa pendaaan lancar. Disamping itu, pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terealisasi kegiatan teknis meliputi Perencanaan, Perlindungan Hutan, Pembinaan Hutan, Penelitian dan pengembangan, dan Pengembangan SDM. Namun, masih terdapat carry over pada RKT sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan teknis dengan pendanaan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	Berdasarkan keberadaan dokumen Rencana dan Realisasi dana berdasarkan RKAP didapatkan realisasi kegiatan Perlindungan dan pengaman Hutan, Pembinaan Hutan, dan Penanaman Tanah Kosong Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 476.118.796 dari rencana sebesar Rp 613.000.000 atau terealisasi sebesar 73,83 % (60-80%).
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan TPTI per Desemebr 2019 dan Evaluasi RKTUPHHK-HA Tahun2 019 didapatkan Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan Hutan Tahun 2019 berupa kegiatan Pengadaan Bibit, Penanaman Pengayaan dan rehabilitasi, Penanaman Kikaja terealisasi rata-rata sebesar 102 %. Namun demikian, pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4. Ketersediaan Berita Acara (BA) Kegiatan Penanaman yang disajikan belum dapat menunjukan bukti yang memadai terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman misalnya detail rinci kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	- Selama periode setahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (tahun 2020), **tidak terdapat perubahan** dokumen terkait areal kawasan yang dilindungi. - Luas kawasan lindung yang ada di dalam areal PT Aditya Kirana Mandiri telah dirinci dalam beberapa dokumen antara lain dokumen ringkasan ANDAL, RKL, dan RPL (1999), dokumen RKUPHHK-HA tahun 2012 periode 2012-2021, dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri berbasis IHMB tahun 2016 periode 2012-2021. - Kondisi biofisk pada kawasan lindung tidak sesuai dikarenakan adanya gangguan perladangan oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	3	Penandaan batas kawasan dilindungi yang telah dilakukan oleh PT Aditya Kirana Mandiri sampai dengan periode penilikan ke 3 Tahun 2020 yaitu mencapai 80,45 %.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah mengoverlaykan kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2019 (sumber : Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 117/59 Liputan Tanggal 26 Desember 2018 dan Liputan Tanggal 31 Januari 2019). Penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 4.090,10 ha **(86,05 %)** dari total luas kawasan dilindungi 4.753 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan dilindungi di areal PT AKM, dikarenakan masih adanya perladangan oleh masyarakat di kawasan dilindungi .
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	BAIK	3	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/*Land scaping*/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(24/27) x 100% = 88,89 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	BAIK	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki prosedur yang lengkap dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Aditya Kirana Mandiri **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki 1 regu inti brigalkarhutla berjumlah 15 orang terdiri dari 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu **(telah sesuai dengan Pasal 35 ayat 1**), namun untuk jumlah regu inti brigalkarhutla **belum sesuai dengan Pasal 38 ayat 3** yaitu dengan luasan areal 42.700 sekurang-kurangnya memiliki 3 regu inti, sedangkan PT AKM saat ini baru memiliki 1 regu inti brigalkarhutla (masih kurang 2 regu inti). Terdapat 1 personil regu inti brigalkarhutla (atas nama Weldianus) yang belum memiliki kompetensi, sehingga **belum sesuai dengan Pasal 35 ayat 3.** PT Aditya Kirana Mandiri **belum** membentuk Regu Perbantuan (MPA – Masyarakat Peduli Api) dalam rangka penguatan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebahakaran hutan dan lahan, namun berdasarkan wawancara dengan Bpk. Weldianus (HRD PPH), kegiatan pembentukan MPA sedang berproses. PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki 7 (tujuh) anggota satpam/security untuk pengamanan di

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				areal kerjanya dan seluruhnya **telah memiliki kualifikasi/kompetensi.**
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	Implementasi kegiatan perlidungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT Aditya Kirana Mandiri belum sepenuhnya mempertimbangkan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki prosedur pengelolaan yang lengkap dan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Daftar **sarana pengelolaan** yang dimiliki oleh PT Aditya Kirana Mandiri, antara lain: - Tempat pengumpulan limbah cair (oli bekas), aki bekas, kain majun, filter oli, besi tua, dll - Tempat penampungan oli bagus - Tempat-tempat sampah dan TPA sudah tersedia dan sudah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya - Bengkel dilengkapi dengan bak pasir untuk pengelolaan ceceran oli dan dilengkapi oil trap - Rumah mesin genset, lantai masih kayu, masih ada tumpahan/ceceran BBM/oli di bawah mesin yang langsung jatuh ke lantai yang kemudian langsung jatuh ke tanah di bawahnya. - Tempat penyimpanan dan pendistribusian bbm **Daftar Sarana Pemantauan** yang dimiliki oleh PT Aditya Kirana Mandiri, antara lain: - Alat penakar hujan Ombrometer, 1 unit

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Plot pantau erosi, 1 unit di blok RKT 2019 petak 20 BF - Sarana SPAS yang dilengkapi dengan patok berskala, yang dipasang di Sungai Blu Sarana pengelolaan/pemantauan yang **belum** tersedia sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP adalah, - PT Aditya Kirana Mandiri **belum** memiliki ijin TPS limbah. - PT Aditya Kirana Mandiri **belum** memiliki SPK Pengelolaan Limbah dengan pihak ketiga yang berizin, khususnya pengelolaan limbah B3
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Berdasarkan arahan dari pihak BPHP Wilayah XI Samarinda, terkait PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka ketentuan di Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 ini masih tetap digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria ekologi, dengan luas areal PT AKM +42.700 ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang. PT AKM sebelumnya memliki 2 (dua) GANISPHPL-BINHUT atas nama Supandi, S.Hut (No. Reg. 02340-11/BINHUT/XX/2017) dan Hermansyah (No. Reg. 02331-11/BINHUT/XX/2017), namun per tanggal 1 Juni 2020 Sdr. Hermansyah sudah tidak bekerja di PT AKM (resign). Hal ini sesuai wawancara dengan Bpk. Weldianus (HRD PPH), diperoleh informasi bahwa Sdr. Hermansyah sejak per tanggal 1 Juni 2020 sudah tidak menjadi karyawan PT AKM (Resign). Dengan demikian PT AKM sampai dengan periode audit Agustus 2020, hanya memiliki 1 orang personil GANISPHPL-BINHUT.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	PT Aditya Kirana Mandiri **telah memiliki** dokumen rencana pengelolaan dampak yakni dokumen RKL tahun 1999, dan telah diimplementasikan **sebagian**. Selanjutnya, PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan pengelolaan LB3 namun **belum sepenuhnya** sesuai dengan SOP atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil foto lapangan di area rumah genset, drum tempat penampungan oli bekas, tempat pendistribusian bbm, masih banyak ditemukan ceceran oli bekas dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah. Selain itu, PT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Aditya Kirana Mandiri **belum** memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT Aditya Kirana Mandiri **telah memiliki** dokumen **rencana pemantauan** dampak yakni dokumen RPL tahun 1999, dan telah diimplementasikan **sebagian**. Kegiatan pemantauan yang masih belum dan/ atau kurang adalah pemantauan kondisi sungai agar badan air tidak terganggu dan pemantauan sedimentasi.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	**Air** Pada laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2019, PT AKM belum melakukan uji laboratorium terkait kualitas air dan pada laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I Tahun 2020, telah mengajukan pengujuain kualitas air bekerjasama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Berau, namun hasil ujinya belum keluar. Adapun parameter yang diuji sesuai nota pembayaran yaitu Chlorine (Cl2), Besi (Fe), Mangan (Mn), Flourida (F), Amoniak (NH_4), Nitrat (NO_3), Nitrit (NO_2), Ph Meter dan kekeruhan. **Tanah** Pada laporan laju erosi tidak dirinci kedalaman solum tanah pada pengujian bak erosi dan hasil aktual belum dikonversikan ke satuan ton/ha/tahun, sehingga belum bisa menetukan nilai/ tingkat laju erosi. PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan pengelolaan limbah domestik dan LB3 namun **belum sepenuhnya** sesuai dengan SOP atau peraturan yang berlaku. Pengelolaan limbah domestik belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sampai ke lokasi TPA. Lebih jauh, masih ditemukan masih banyak ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah di area bengkel blok produksi, rumah genset, drum tempat penampungan oli bekas, dan tempat pendistribusian bbm.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HA PT AKM.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan, namun belum pada seluruh kawasan dilindungi dan areal efektif produksi (areal blok tebang). Kegiatan identifikasi baru dilakukan pada kawasan dilindungi KKI.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HA PT AKM.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	Kegiatan pengelolaan flora, belum dilakukan secara spesifik terhadap suatu flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, seperti pemberian tanda pada jenis pohon dilindungi terutama di areal efektif produksi (termasuk di pinggir jalan utama). Bentuk-bentuk kegaitan pengelolaan flora dilindungi sebagaimana yang ada dalam prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna, banyak yang belum terimplementasikan.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Berdasarkan rekaman audit sebelumnya (penilikan ke-2 Tahun 2019), diketahui bahwa terdapat ladang masyarakat yang tersebar dalam areal sempadan sungai, seperti sempadan sungai Duhung berupa ladang coklat dan sempadan Sungai Blu Glop berupa ladang padi. Hasil wawancara dengan Bpk. Weldianus selaku HRD PPH, diperoleh informasi bahwa benar pada areal kawasan dilindungi yaitu sempadan sungai duhung terdapat ladang padi dan tanaman buah-buahan seperti coklat, durian, cempedak milik masyarakat sekitar dan pada sempadan sungai blu glop terdapat ladang dengan tanaman buah-buahan seperti coklat, durian, cempedak milik masyarakat serta pada sempadan sungai long keluh terdapat ladang merica milik masyarakat. Dengan demikian terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langkah dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HA PT AKM.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	BAIK	3	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan pengelolaan fauna antara lain Pemasangan papan nama larangan jenis satwa dilindungi, Pemasangan papan nama larangan berburu hewan yang dilindungi (orang utan, owa owa, beruang, rangkong badak,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			rangkong gading) dan Penanaman pakan satwa jenis durian dan cempedak di SS Blu di samping basecamp 51.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan informasi dari auditor sosial, masyarakat disana masih aktif melakukan perburuan dan buruannya yaitu jenis satwa babi hutan. Babi Hutan tidak termasuk satwa dilindungi. Adapun perburuan babi hutan tersebut untuk kebutuhan pribadi dan tidak diperjualbelikan. Hasil wawancara dengan Bpk. Weldianus (HRD PPH), memang benar bahwa masyarakat masih aktif melakukan perburuan dan jenis buruannya hanya babi hutan dan tidak melakukan perburuan jenis satwa lainnya dan/ atau jenis satwa dilindungi. Dengan demikian tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang berada di areal pemegang izin.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	Dokumen PT AKM terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. Revisi Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000 2. Peta Deliniasi Kawasan Perladangan pada areal IUPHHK-HA skala 1 : 155.000, 3. Penilaian High Conservation Value Forest PT Aditya Kirana Mandiri pada NKT 5 dan 6 Tahun 2016 4. Rekapitulasi Data dan Informasi Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Desa sekitar di Areal PT AKM (s.d Agustus 2020), hasil identifikasi terdapat 56 Kelompok keluarga yang kalim lahan dengan luasan sekitar 3,968,7 Ha.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Dokumen PT AKM yang tersedia **belum memberikan** informasi yang cukup terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT AKM dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020, serta untuk rencana kelola sosial PT AKM telah menyusun Rencana Operasional (RO) Tahun 2019 & 2020, akan tetapi masih kurang lengkap dan belum dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	BAIK	3	PT AKM telah memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Delineasi Batas Kawasan dengan Masyarakat 2. SOP Penyelesaian Konflik Sosial Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia telah sesuai dan telah diimplementasikan dalam penataan batas partisipatif antar kampung yang ada di areal PT AKM serta dalam proses penyelesaian konflik dengan masyarakat yang timbul.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	PT AKM telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Peningkatan Akses masyarakat terhadap Hutan 2. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat 3. SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat Prosedur yang ada telah memiliki sistimatika yang lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, tahapan- tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan. SOP – SOP tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	SEDANG	2	Berdasarkan Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000, areal PT AKM berada di wilayah administrasi Kampung Long Suluy, Long Lamcin, Long Pelay, Long Keluh dan Long Duhung, Kecamatan Kelay Kab. Berau. Berdasarkan peta tersebut luas wilayah masing-masing kampung yang masuk dalam areal konsesi PT Aditya Kirana Mandiri sudah dideliniasi berdasarkan batas wilayah administrasi Kecamatan Kelay akan tetapi **sebagian kampung belum** menyetujuinya, batas kampung tersebut digunakan sebagai acuan dalam Pembayaran Fee

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kompensasi oleh PT AKM kepada masyarakat. Batas kampung di areal PT AKM yang sudah dilakukan penandaan batasnya antara lain : a. Batas Kampung Long Duhung dengan Long Keluh di Blok RKT 2019 (petak BE 20) b. Batas Kampung Long Lamcin dengan Long Pelay (berupa Batas Alam) Hasil identifikasi perladangan masyarakat di areal Kerja UPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri pada Agustus 2020, terdapat Klaim pemanfaatan lahan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun di areal PT AKM sebanyak 56 kelompok keluarga dengan luas 3.969,7 Ha, akan tetapi belum dilakukan penataan batasnya di lapangan. PT AKM memiliki **sebagian bukti** dokumen terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	BAIK	3	PT AKM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan diterbitkan SK IUPHHK-HA dan disahkannya RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA PT AKM serta terdapat dukungan dari masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Long Duhung dan Long Keluh yang tertuang dalam : 1. Berita Acara Sosialisasi PT AKM RKT Tahun 2019 di Kampung Long Duhung, dengan beberapa kesepakatan 2. Hasil Kesepakatan/hasil rapat PT AKM dengan Kampung Long Keluh, tanggal 13 Januari 2019 3. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2020 IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 5 Agustus 2020 4. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2020 IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Januari 2020 Lokasi Blok RKT PT AKM Tahun 2019 dan 2020 berada di wilayah administrasi Kampung Long Duhung dan Long Keluh maka sosialisasi dan persetujuan dilakukan pada 2 (dua) desa/kampung tersebut. Pada areal PT AKM masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait batas antar desa di areal kerjanya sebagian belum definitif dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik. PT AKM memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /21) x 100 % = 85,71 %

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 1. SK IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri Nomor : 862/Kpts-VI/1999 tanggal 12 Oktober 1999. 2. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 3. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 4. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT AKM Tahun 2019 dan Tahun 2020, pada RO Tahun 2019 antara Rencana dan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial tidak sama. 5. Laporan Semester I & II Realisasi PMDH/ Kelola Sosial PT AKM Tahun 2019 dan Rekap kegiatan Kelola Sosial PT AKM Tahun 2020, akan tetapi laporan tidak disampaikan secara rutin kepada Instansi terkait (laporan semesteran). 6. Kesepakatan dengaan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi & Sewa Lokasi Base Camp serta kegiatan sosial lainnya. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AKM memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan, namun tidak lengkap.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	PT AKM telah memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam : 1. SOP Bina Desa 2. SOP Distribusi Insentif 3. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat Seluruh prosedur telah mengakomodir proses tanggung jawab kepada masyarakat, sistimatika penyusunan sudah lengkap mencangkup tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-3, kegiatan sosialisasi PT AKM kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)			sebagai berikut : 1. Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2019 PT AKM dan pernyataan persetujuan dari masyarakat Long Duhung, dengan terdapat beberapa kesepakatan terkait Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial. 2. Hasil Kesepakatan/hasil rapat PT AKM dengan Kampung Long Keluh, tanggal 13 Januari 2019 3. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Keluh terhadap URKT Tahun 2020 IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 12 Januari 2020 4. BA Sosialisasi dan Pernyataan Persetujuan Desa Long Duhung terhadap URKT Tahun 2020 IUPHHK-HA PT AKM, tanggal 5 Agustus 2020 Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT AKM masuk wilayah administrasi Kampung Long Duhung dan Long Keluh Kec. Kelay, sehingga sosialisasi RKT dan lainnya dilakukan pada 2 (dua) desa tersebut dan terdapat kesepakatan/dukungan terkait operasional PT AKM dan telah direalisasikan sesuai kesepakatan. PT AKM memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	BAIK	3	PT AKM memiliki bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam : 1. Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar, sesuai kesepakatan. 2. Pembayaran Sewa Lokasi Base Camp KM 82 dan KM 51 3. Bantuan Alat Berat untuk perbaikan jalan, pembuatan jalan menuju air terjun dan penyiapan lokasi perumahan guru & Tandon Air 4. Bantuan BBM untuk penerangan/listrik di 5 (lima) desa sekitar (masing-masing 1 drum/bulan) 5. Bantuan Transportasi Masyarakat ke Kabupaten 6. Pemanfaatan Tenaga Perakitan 7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 8. Kerjasama Suplai hasil pertanian dengan masyarakat sekitar (ada SPK). Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa PT AKM memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki **sebagian** dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. Laporan Kelola Sosial PT AKM Semester I & II Tahun 2019 2. Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT AKM Tahun 2020 (s/d Agustus), format laporan tidak standar. 3. BAST Pembayaran Fee Kompensasi dan sewa lokasi Base camp. 4. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2020, tersedia sebagian Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AKM telah membuat Laporan Realisasi Kelola Sosial Semester I & II Tahun 2019 dan Rekap Kegiatan Kelola Sosial tahun 2020 (format tidak standar), BAST tersedia sebagian dan tidak disampaikan secara rutin ke Instansi Terkait.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	PT AKM sebagian memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam : 1. Revisi RKUPHHK-HA PT AKM Periode Tahun 2012 – 2021 2. Peta Sebaran Desa sekitar IUHPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja (ada 69 orang) 4. Kontraktor Perakitan dari Lokal (ada 1 Kontraktor) 5. Kerjasama Suplai Hasil Pertanian PT AKM dengan masyarakat sekitar (an. Daring) 6. Penilaian *High Conservation Value Forest* PT Aditya Kirana Mandiri pada NKT 5 dan 6 Tahun 2016 Akan tetapi PT AKM **belum memiliki** dokumen terkait dengan Aktivitas Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar arealnya serta pengelolaannya dan pemanfaatan

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lahan oleh masyarakat sekitar.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	BAIK	3	PT AKM telah memiliki mekanisme **yag lengkap** terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Bina Desa 2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 3. SOP Distribusi Insentif 4. SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah diiplementasikan dalam kerjasama suplai hasil pertanian, Kerjasama Perakitan dan Kesepakatan terkait Fee Kompensasi & sewa Base camp KM 51 dan KM 82.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT AKM memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : 1. RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 2021 2. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 & Tahun 2020 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT AKM Tahun 2019 & 2020 4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT AKM pada saat dilakukan sosialisasi RKT 5. Surat permohonan kemitraan kehutanan warga Long Duhung Nomor 44/PEMKAM-LD/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 (Pembuatan jalan ke lokasi). Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, PT AKM memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH akan tetapi program kegiatannya yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHk-HA dan RO Kelola Sosial **tidak sinkron**, serta Kegiatan Kelola Sosial PT AKM sebagian besar berdasarkan hasil kesepakatan dan usulan dari Masyarakat.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT AKM terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT AKM Tahun 2019, realisasi atau sebesar 0 % (berupa bantuan sembako dan alat tulis sekolah) 2. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan yang berasal dari Lokal (ada 1 dan berasal dari lokal), atau sebesar 100 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (21 dari 69 orang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				karyawan), atau sebesar 30,43 % 4. Kerjasama dengan Suplier dari lokal (1 kampung diantara 5 kampung sekitar), atau sebesar 20 % 5. Pembayaran Fee Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT AKM sebesar : (0 + 100+ 30,43 + 20) % : 4 **= 37,61 % (< 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	PT AKM memilki **sebagian** bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AKM Tahun 2019 2. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AKM Tahun 2020 (s.d Agustus) 3. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2019 4. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi dan sewa base camp 5. Rekap Upah Borongan perakitan sesuai SPK 6. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara : - PBB Tahun 2019, tidak tersedia - PPh 21, tersedia sebagian - BPJS Tenaga Kerja, tahun 2020 tidak tersedia - BPJS Kesehatan masih dalam proses
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT AKM memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016 tertuang dalam dokumen : 1. SOP Penyelesaian Konflik Sosial 2. Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Job Description yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 5 Agustus 2020. Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial, bertujuan sebagai

<table>
<tr><th>No.</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>pedoman/acuan dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dengan masyarakat. Sistimatika prosedur sudah lengkap, dimana tahapan dalam penyelesaian konflik.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>4.4.2.
Tersedia peta konflik
(D)</td><td>BAIK</td><td>3</td><td>PT AKM memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam Peta Potensi dan Resolusi Konflik di dalam dan diluar areal IUPHHK-HA PT AKM skala 1 : 155.000, dalam peta tersebut terdapat informasi sebaran konflik yang ada di PT AKM.
PT AKM telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi Konflik pada areal IUPHHK-HA PT AKM dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan PT AKM telah mengirim laporan pemetaan konflik tersebut kepada Instansi terkait terdapat bukti pengiriman.
Dari hasil uraian dalam laporan Pemetaan Potensi Konflik PT AKM pada 1 tahun terakhir terdapat 5 potensi konflik seperti tercantum dalam tabel berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Luas (Ha)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Terganggunya lalu lintas sekitar logpond</td><td>24</td><td>Aman</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Debu jalan hauling di kampung Batu Rajang</td><td>508</td><td>Aman Sudaha da kesepakata n</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Perladangan di areal kerja PT AKM</td><td>62; 34 ; 146</td><td>Aman; Terkendali</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Keterlambatan program Bina Desa</td><td>L.Keluh & L. Duhun g</td><td>Aman</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Penolakan Lokasi Blok RKT 2020</td><td>L.Keluh</td><td>Waspada</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>4.4.3.
Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
(D)</td><td>BAIK</td><td>3</td><td>PT AKM memiliki lembaga yang menangani konflik tertuang dalam SK Direktur Utama IUPHHK-HA No.002/AKM-IA/08.20 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Satuan Operasional Resolusi Konflik (SORK), dilengkapi dengan SDM dan Tugas dari Tim SORK.
Susunan Tim SORK PT AKM adalah :
1. Penanggung Jawab : Direksi
2. Ketua : Sugianto
3. Adm SIM PHPL : Hasri Ainin Besari</td></tr>
</table>

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				4. Anggota Bidang Kelola Sosial : Weldianus 5. Anggota Bidang Umum : Husairi 6. Anggota Bidang Humas :Daring Pada point ke empat dari SK tersebut tercantum bahwa anggaran biaya operasional untuk penyelesaian konflik per tahun sebesar Rp. 75.000.000,- PT AKM memiliki Struktur Organisasi yang menangani konflik dilengakpi dengan SDM yang cukup serta terdapat anggaran yang memadai dalam penanganan konflik di arealnya.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	BAIK	3	Pada periode Penilikan ke-3, berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang telah disusun oleh PT AKM, di areal PT AKM terdapat 5 potensi konflik dan PT AKM telah melakukan telah melakukan pendekatan akhirnya 2 (dua) kasus sudah diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan, kasus tersebut adalah : 1. Kasus debu di jalan hauling di desa Batu Rajang, telah diselesaiakn dengan kesepakatan tersedia BA Kesepakatan (ada kronologis) 2. Kasus Penolakan terhadap lokasi Blok RKT Tahun 2020 oleh masyarakat Long Keluh, dan telah diselesaikan dengan musyawarah PT AKM telah menyusun laporan terkait proses penyelesaian konflik yang terjadi serta telah melaporkan kepada Instansi Terkait (Dishut Provinsi Kaltim), terdapat bukti pengirimannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24 /24) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	PT AKM telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen : 1. PP PT AKM Periode 2018 -2020 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau, Nomor : KEP.560/914.4.KSK tanggal 3 Desember2018 berlaku 2 (dua) tahun sejak disahkan (2 Desember 2020). 2. Terdapat BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir tanggal 17 Desember 2018 (peserta 15 orang) dan tanggal 9 September 2020 (dengan peserta 15

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				karyawan) 3. Di PT AKM belum terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang dituangkan dalam PP PT AKM Periode 2018 - 2020 Pasal 32. 4. Terdapat contoh SPK Karyawan PT AKM an. Harun Aying dan Hanok Gadsman (PKWT) 5. Terdapat SK Gub. Kaltim No. 561/K.554/2018 tanggal 14 November 2018 tentang UMK Kabupaten Berau Tahun 2019 (sebesar Rp. 3.120.996) 6. Terdapat SK Gub. Kaltim No.561/K.609/2019 tanggal 18 November 2019 tentang UMK Kabupaten Berau Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.386.593) 7. Contoh Slip Gaji Karyawan PT AKM terendah an. Her dan HA, upah yang diterima diatas UMK Kab. Berau yang berlaku Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT AKM diperoleh informasi bahwa karyawan PT AKM telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki mekanisme peningkatan kompetansi tertuang dalam Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan PT AKM Tahun 2019, PT AKM telah mengimplementasikan Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Tahun 2019 ada 6 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 24 orang, dan realisasi jenis pelatihan mencapai 100 % sedang jumlah peserta mencapai **91,67 %.** Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT AKM memiliki 8 orang GANIS PHPL (kartu Ganis masih berlaku) terdiri : Kurpet = 1 orang, Canhut = 2 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut = 2 orang (1orang, resign Juni 2020), PKB-R = 3 orang Berdasarkan ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015, masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL sebanyak 2 orang (Nenhut =1 dan Binhut =1 (resign pada Juni 2020).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peratuan Perusahaan PT AKM Periode 2018 – 2020 Pasal 33 tentang Mutasi & Promosi dan SOP Penerimaan Karyawan Baru & SOP Evaluasi dan Promosi Jabatan. Pada periode 1 tahun terakhir, terdapat implementasi promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan format penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada serta Karyawan PT AKM seluruhnya berstatus sebagai karyawan PKWT/Kontrak. PT AKM memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian yang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diimplementasikannya
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	PT AKM memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang PP PT AKM Periode 2018 – 2020 dan telah mengimplementasikan **sebagian** tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku. Tunjangan kesejahteraan karyawan PT AKM antara lain : 1. Gaji karyawan semuanya diatas UMK yang berlaku di Kab Berau dan beberapa bulan terakhir pembayarannya kurang lancar 2. Karyawan tinggal di mess yang cukup layak dengan fasiltas yang kurang memadai 3. Fasilitas Kesejahteraan di Base Camp KM 51 yang ada masih kurang memadai 4. Terdapat Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober dan November 2019, bukti terbaru tidak tersedia 5. Karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan terdapat contoh kartu BPJS an. Fransiscus dan Gatot Adi Widianto, dan dibidang kesehatan Karyawan tidak diikutsertakan BPJS Kesehatan (masih proses), namun biaya berobat ditanggung perusahaan untuk karyawan ybs.. PT AKM memiliki sebagian dokumen Tunjangan Kesehatan terhadap Karyawan dan baru sebagian yang telah diimplementasikannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	**Dokumen SK IUPHHK-HA** PT Aditya Kirana Mandiri memiliki SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 862/Kpts-VI/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Aditya Kirana Mandiri di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. SK IUPHHK- HA

		yang diverifikasi adalah SK yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Dr. Ir. Muslimin Nasution pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan legalitas yang sah dan distempel. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA, yaitu berupa Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Aditya Kirana Mandiri (sebagian Eks HPH PT Alas Helau) Kelompok Hutan Sungai Kelay Provinsi Dati I Kalimantan Timur Luas ± 42.700 Ha, Skala Peta 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Ir. Muslimin Nasution dan dicap. **Dokumen Legalitas Perusahaan** - Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri No 18 tgl 12 Februari 1999 Notaris Chufran Hamal, S.H. - Terdapat Akte Perubahan No 13 tgl 12 Juni 2020 Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H. Susunan Pengurus berdasarkan akte perubahan tersebut adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Erwan Soekardja • Komisaris : Sandiana Soemarko • Komisaris : Ersatria Reza • Komisaris : Herry Soetio • Direktur Utama : Djohansyah Ramlie • Direktur : Ersaputra Rekardianto • Direktur : Aimee Emerald Ramlie • Direktur : Ersandria Rendrata • Direktur : Arya Setyaki • Direktur : Imam Harmain Aziz - NPWP No 01.893.827.4.727.000 atas nama PT Aditya Kirana Mandiri Jl. P. Manimbora No 88 RT 30 Tanjung Redeb Tanjung Redeb Berau – Kalimantan Timur.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Pada periode Penilikan Ke-3 tidak terdapat perubahan pada dokumen SPP IIUPHHK-HA dan Bukti Setor IUPHHK : - Dokumen Surat Perintah Pembayaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor S.352/VI-BIKPHH/2010 tanggal 28 April 2010 dengan tagihan bayar sebanyak Rp. 3.736.250.000,- - Terdapat Bukti Setor yaitu berupa : a. Bukti Setor tanggal 15 Mei 2012 dari Bank BII sejumlah Rp 3.586.250.000,- transfer dengan nama pengirim PT Aditya Kirana Mandiri. Nama Penerima bendaharawan penerima setoran IIUPH Nomor Rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan dengan berita Pelunasan Pembayaran IIUPH an. PT Aditya Kirana Mandiri. b. Bukti setor tanggal 28 September 2010 dari Bank BII sejumlah Rp. 150.000.000,-. transfer dengan nama pengirim PT Aditya Kirana Mandiri. Nama penerima Bendaharawan penerima Setoran IIUPH Nomor rek. 1020004203870 pada Bank mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**RKTUPHHK-HA** PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 - 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. 4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016, tanggal 31 Desember 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, SK ditandatangani oleh Pejabat A.n. Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama NIP 19590502 198603 1 001 dan dilengkapi 3 (tiga) peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000. **RKTUPHHK-HA** • Terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (Carry Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK No SK.522.110.1/72/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 07 April 2019 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berlaku s/d 31 Desember 2019). • Terdapat RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry Over) PT Aditya Kirana Mandiri telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Aditya Kirana Mandiri sesuai dengan SK No. 01/AKM/Kpts-RKT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berlaku s/d 31 Desember 2020). **GANIS PHPL CANHUT** PT Aditya Kirana Mandiri memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama : • Suwanto Reg.02769/CANHUT/XX/2020 sesuai SK Nomor SK.108/BPHP.XI/PEPHP /1/2020 masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2021. • Supandi, S.Hut Reg.01046-11/CANHUT/XX/2013 sesuai SK Nomor SK.1690/BPHP.XI-3/2018 masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	M	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2002 yang memuat areal-areal

RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan		yang tidak boleh ditebang berupa : - Buffer Zone Hutan Lindung, - Kawasan Konservasi Insitu (KKI); - Sempadan sungai; - Areal Tegakan Benih, dan Areal PUP; - Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Insitu (KKI); - Sempadan sungai; - Areal Tegakan Benih, dan - Areal PUP Berdasarkan hasil pengambilan data lapangan berupa dokumentasi foto lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain : - KKI pada koordinat N 01° 51' 46,56" dan E 116° 52'2,99". - Sempadan Sungai Blu Lenga pada koordinat N 01˚54' 18,4" ; E 116˚56' 40,1". Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan sesuai foto dokumentasi pengecekan di lapangan dan sesuai dengan peta pada Aplikasi Avenza maps yang telah di*screenshoot.*
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah melaksanakan penggambaran Blok Tebangan pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020. Hasil dokumentasi foto berkoordinat dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : - Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 1^0 50' 49,02" dan E 116^0 54' 7,15" terdapat patok dan plang RKT dan penandaan pada batang kayu dicat warna merah //. - Batas Petak AY 25 I AZ 25 RKT 2020 pada koordinat 1^0 51' 3,63" dan E 116^0 52' 29,99 terdapat patok batas petak warna merah putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah /. - Batas Petak AX 24 dan AX 23 RKT 2020 pada koordinat N 1^0 51' 53,71" dan E 116^0 51' 25,06" terdapat patok batas petak warna merah putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah /. - Batas Petak AY 25 I AY 24 RKT 2020 pada koordinat N 1^0 51' 21,33" dan E 116^0 51' 59,17" terdapat patok batas petak warna merah putih dengan batas pada batang kayu dicat warna merah /. Penandaan Lokasi Blok dan Petak tebangan RKTUPHHK-HA diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4146/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021; SK ditandatangani oleh Pejabat A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananIda Bagus Putera Parthama NIP 19590502 198603 1 001. Pada dokumen RKUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri periode 2012-2021 diketahui bahwa sistem silvikultur yang diterapkan adalah sistem Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI).
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Aditya Kirana Mandiri merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Silvikultur TPTI, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki Petugas Pembuat LHP atas nama Wartono Reg. 01049-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2022 telah tercatat pada SIPUHH Online. SK Pengangkatan sebagai Pembuat LHP melalui SK Direktur No. 005/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020. Pada Periode Audit (November 2019 s.d. Agustus 2020) terdapat Pembuatan LHP sebanyak 1.361 Batang 5.682,85 m^3. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb : 1. Stok Awal, 2082 Btg, 8.490,54 M3 2. Penambahan (LHP) = 348 Btg, 1.482,47 M3 3. Pengurangan (SKSHHK, ~~DKDS~~) = 2.418 Btg, 9.677,69

		M3 4. Stok Akhir, 87 Btg, 289,62 M3 - Di TPK Hutan = 0 Btg, 0,00 M3 - Di TPK Antara = 87 Btg, 289,62 M3 Uji petik Pengukuran Kayu di TPK Antara pada koordinat E 2°07'28,9" N 117°13'23,0"E didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume 2,02% yang tidak melebihi toleransi 5%.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Aditya Kirana mandiri telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPn dan TPK Hutan tercantum dalam pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan Tahun 2020. - SK TPK Antara diterbitkan oleh Direktur PT Aditya Kirana Mandiri dengan SK No. 005/AKM-Ia/06.15 tanggal 24 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara. Terdapat Penetapan Penerbit SKSHHK atas nama : - Muhammad Yunani untuk SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 02747-11/PKB-R/XX/2019 berlaku s.d tanggal 21 Mei 2023 dan Ditetapkan melalui SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri No 006/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020 serta Ditepatkan kembali melalui SK Direktur No 009/AKM-Ib/05.20 tanggal 16 Mei 2020. - Supandi S. Hut untuk SKSHHK di TPK Antara I dan TPK Antara II, dengan Register No. 01050-11/PKB-R/XX/2013 berlaku s.d tanggal 22 Maret 2022 dan Ditetapkan melalui SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri No 007/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020. Terdapat Penetapan Ganis P3KB atas nama : - Wartono dengan Register No. 01049-11 /PKB-R/XX/2013 berlaku s.d tanggal 10 April 2022 dan ditetapkan melalui SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri No 008/AKM-Ib/01.20 tanggal 23 Januari 2020. Pada periode audit (November 2019 s.d. Agustus 2020), PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara I menggunakan Logging Truck sebanyak 114 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.361 Batang dengan Volume 5.682,85 m^3. - Dari TPK Antara I menuju TPK Antara II

		menggunakan Tongkang sebanyak 4 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.437 Batang dengan Volume 6.125,08 m^3. - Dari TPK Antara I menuju Industri menggunakan Logging Truck sebanyak 18 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 981 Batang dengan Volume 3.552,61 m^3. - Dari TPK Antara II menuju Industri menggunakan Tongkang sebanyak 4 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.437 Batang dengan Volume 6.125,08 m^3. Berdasarkan pengecekan LMKB terdapat kesesuaian antara LMKB pada SKSHHK terkait.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: - Barcode SIPUHH warna Kuning - Penomoran bantu menggunakan cat pada batang kayu warna biru yang dicatat ke dalam buku ukur untuk memudahkan pendokumentasian catatan identitas kayunya. - Label intern warna putih pada batang kayu yang berisi informasi tentang RKT, Nomor Batang, Jenis Kayu, Panjang dan Diameter untuk memudahkan pencatatan dan dokumentasi kayunya. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak BD19 Sebagai berikut : - Kayu dengan barcode No.34481 ; LHP No. 01/AKM-LHP-Block-KB/06.20 ; SKSHHK Logging No. KB.B.6815556 ; tanggal : 23-Juni-2020; SKSHHK Tongkang No. KB.B.6902814 tanggal : 13-Juli-2020 - Kayu dengan barcode No.34793; LHP No.01/AKM-LHP-Block-KB/06.20; SKSHHK Logging No. KB.B.6815560 ; tanggal 23-Juni-2020 ; SKSHHK Tongkang No.KB.B.6902814 ; tanggal 13-Juli-2020
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp PT Aditya Kirana Mandiri beserta SDM dan operatornya. Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH Online dapat dilakukan dan tidak terdapat kendala di lapangan. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan.

		Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Aditya Kirana Mandiri dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 93.475,55 - PSDH sebesar Rp 458.221.440,00
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 93.475,55 - PSDH sebesar Rp 458.221.440,00 Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT Aditya Kirana Mandiri dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan III, IV tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2020 melalui Email. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Aditya Kirana Mandiri telah dibayarkan.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah

		Kalimantan. (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDULVERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	PT Aditya Kirana Mandiri selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Semarang sebanyak 3 kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan. Tersedia lengkap dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Aditya Kirana Mandiri telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 019.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Aditya Kirana Mandiri. dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 15 Agustus 2017 s.d. 14 Agustus 2022. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian LEGAL Wood 019.SPHPL.019-IDN LHPPHPL-019-IDN” dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “Indonesian LEGAL Wood 019.SPHPL.019-IDN LHPPHPL-019-IDN”.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	Tersedia Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Nomor: 104/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 4 Agustus 1999 perihal Penyusunan dokumen AMDAL HPH PT Aditya Kirana Mandiri, yang menyatakan bahwa PT AKM tidak wajib menyusun dokumen AMDAL baru, melainkan hanya menyusun dokumen RKL dan RPL saja, karena areal kerja PT AKM merupakan bagian areal Eks. HPH PT Alas Helau yang menyusun Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL sesuai surat no: 221/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 21 Februari 1994 dan no: 227/DJ-AMDAL/95 tanggal 15/11/1995

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Tersedia dokumen RKL dan RPL PT Aditya Kirana Mandiri yang disusun Fakultas Kehutanan IPB dan diprakarsai oleh PT Aditya Kirana Mandiri, pada September 1999 dan mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan, No: 1764/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	Tersedia lengkap untuk Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dan hasil telaah Laporan RKL/RPL PT Aditya Kirana Mandiri diketahui bahwa sesuai dengan Rencana dan Dampak Penting yang terjadi di lapangan, serta terdapat bukti tanda terima Laporan dari Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau sesuai dengan Dokumen Log Book/ ekspedisi. Terdapat Tanda tangan penerima dan Cap basah. Terdapat dokumentasi Lapangan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL berupa : ○ Pengelolaan melalui Penandaan Kawasan Lindung. ○ Pemantauan Curah hujan menggunakan Ombrometer.

		○ Pemantauan erosi melalui bak Erosi. ○ Pemantauan Debit Air Sungai.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	Pada Penilikan Ke-3 diverifikasi tidak terdapat perubahan pedoman/ prosedur K3 sesuai dengan kondisi SOP K3 No. 001/AKM/SOP-K3/01.13 tanggal 2 Januari 2013. Terdapat Penunjukan Petugas yang bertanggung jawab atas K3 sesuai dengan SK Direktur PT Aditya Kirana Mandiri Nomor : 032/AKM-1a/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Personil K3 di PT Aditya Kirana Mandiri.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Aditya Kirana Mandiri memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per tanggal 5 Agustus 2020. Adapun peralatan K3 PT Aditya Kirana Mandiri dapat diverifikasi keberadaannya dan diketahui berfungsi berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Aditya Kirana Mandiri Dan berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Aditya Kirana Mandiri tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : - Pelatihan K3 - Penyuluhan K3

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada lingkungan karyawan PT Aditya Kirana Mandiri belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun, Terdapat Kebijakan Perusahaan tentang Kebebasan berserikat pada PT Aditya Kirana Mandiri yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan di pasal 32, yang berbunyi : “Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha, karyawan/buruh dapat membentuk serikat pekerja/buruh di dalam lingkup perusahaan.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat peraturan perusahaan PT Aditya Kirana Mndiri yang telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kab. Berau Nomor: KEP.560/914.4.KSK tanggal 3 Desember 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Aditya Kirana Mandiri mulai tanggal 3 Desember 2018 s/d 3 Desember 2020.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tersedia Daftar Karyawan terbaru per Agustus 2020. Berdasarkan Daftar Karyawan tersebut diketahui bahwa PT Aditya Kirana Mandiri memiliki sejumlah 98 Orang Karyawan. Karyawan termuda atas nama Ferdiansyah jabatan Helper Opt. Traktor lahir di Berau Tahun 2001. Diverifikasi bahwa karyawan termuda telah lebih dari 18 Tahun.

Trustindo Certification

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	BAIK	3	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	BAIK	3	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			56	66
NILAI KINERJA AKHIR			**84,85 %**	**BAIK**

Samarinda, 30 September 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur